



NOTA PENGANTAR
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
GUBERNUR SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2021

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Selamat Pagi dan Salam Sejahtera Bagi Kita Semua

- Yth. Wakil Gubernur Sumatera Barat;
- Yth. Ketua, Wakil Ketua Dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat;
- Yth. Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Ketua Pengadilan Tinggi Dan Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Barat;
- Yth. Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Asisten, Kepala OPD Dan Kepala Biro Lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
- Yth. Para Pimpinan Instansi Vertikal, BUMN/BUMD, Rekan-Rekan Pers Media Cetak Dan Elektronik; Hadirin Undangan Yang Berbahagia.

Pertama dan utama sekali, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhana Wata'ala Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita semua dapat hadir pada hari ini dalam Sidang Paripurna Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021.

Shalawat Serta Salam, marilah kita sampaikan Kepada Nabi Muhammad Salallahu'Alaihi Wassalam, beserta keluarga dan para sahabatnya, semoga Al-qur'an dan hadist yang telah beliau sampaikan, selalu menjadi pedoman bagi kita semua menuju jalan yang diridhoi Allah Subhanahu Wata'ala.

Sdr. Ketua, Hadirin Sidang Paripurna DPRD Yang Saya Hormati,

Pada kesempatan ini, perkenankanlah kami melaksanakan salah satu kewajiban konstitusional sebagai Kepala Daerah, yakni menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021.

LKPJ kali ini, merupakan bentuk pertanggungjawaban Kami selaku Gubernur Sumatera Barat untuk Tahun pertama dari rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat tahun 2021- 2026. Dokumen LKPJ kami susun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pelaksanaan Pembangunan Provinsi Sumatera Barat sepanjang Tahun 2021, pada hakekatnya merupakan hasil sinergi, inovasi dan kinerja bersama Pemerintah Daerah dengan DPRD Provinsi Sumatera Barat, Forum Pimpinan Daerah, Organisasi Kemasyarakatan, Lembaga Profesi, Perguruan Tinggi, Tokoh-tokoh Agama, Insan Pers, dan seluruh lapisan masyarakat Sumatera Barat.

Untuk itu, izinkanlah kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat serta seluruh Stakeholders lainnya atas dukungan dan kerjasamanya, sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan daerah selama tahun anggaran 2021 dapat berjalan dengan baik.

Harapan kami sebagai Gubernur, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021 ini dapat menjadi bahan bagi DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam memberikan saran, masukan dan rekomendasi serta catatan-catatan untuk penyempurnaan dan perbaikan dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat kedepan.

Pimpinan, Anggota DPRD, Hadirin Yang Kami Hormati,

Kami awali penyampaian LKPJ Gubernur Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021 ini dengan penjelasan tentang gambaran umum Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2021.

Berdasarkan data jumlah penduduk yang bersumber dari Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat, jumlah penduduk Sumatera Barat per-Desember 2021 sebanyak 5.596.336 jiwa, sementara pada tahun 2020 jumlah penduduk sebanyak 5.580.007 jiwa, terjadi penambahan penduduk sebanyak 16.329 jiwa atau 0.29 % dari Tahun 2020.

Sengaja Kami mengawali laporan ini dengan informasi tentang data kependudukan, karena menurut kami, aspek kependudukan merupakan hal paling mendasar dalam pembangunan. Penduduk merupakan pelaku dan sasaran dari pembangunan sekaligus yang menikmati hasil pembangunan tersebut. Oleh sebab itu, maka kualitas penduduk perlu ditingkatkan dan pertumbuhan serta mobilitasnya harus dikendalikan.

Berkaitan dengan hal tersebut, berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan menggunakan metode baru yang dirilis Tahun 2015, hasil perhitungan IPM di Provinsi Sumatera Barat dengan menggunakan penghitungan metode baru pada Tahun 2021 adalah 72,65 dengan rincian komponen Umur Harapan Hidup saat lahir adalah 69,59 tahun, Harapan Lama Sekolah 14,09 tahun, Rata-Rata Lama Sekolah 9,07 tahun dan Pengeluaran Perkapita Disesuaikan Rp.10.790.000,-(Orang/Tahun).

Untuk 19 Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat pada Tahun 2021, IPM tertinggi berada di Kota Padang sebesar 82,90 dan yang terendah adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 61,35. Kemudian, jika dibandingkan dengan IPM rata-rata Nasional Tahun 2021 maka IPM Provinsi Sumatera Barat sebesar 72,65 sudah lebih tinggi dibandingkan dengan IPM rata-rata Nasional yaitu sebesar 72,29, dengan rincian komponen sebagai berikut :

1. Angka Harapan Hidup saat lahir Tahun 2021 adalah sebesar 69,59, mengalami pertumbuhan sebesar 0.12 persen dibandingkan dengan Tahun 2020 yang berada pada angka 69.47.
2. Harapan Lama Sekolah Tahun 2021 adalah 14.09, mengalami pertumbuhan sebesar 0,07 persen dibandingkan dengan Tahun 2020 yang berada pada angka 14.02 Tahun.

3. Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2021 adalah 9,07 Tahun, mengalami pertumbuhan 0.08 persen dibandingkan dengan Tahun 2020 yang berada pada angka 8,99 tahun.
4. Pengeluaran Perkapita Pertahun adalah sebesar Rp.10.790.000/Orang/Tahun mengalami kenaikan dibandingkan Tahun 2020 yang berada pada angka Rp.10.733.000/Orang/Tahun.

Kondisi dari ketenagakerjaan di Provinsi Sumatera Barat, menurut Berita Resmi Statistik No.29/05/13/Th. XXIV, 05 Mei 2021, yang diterbitkan Badan Pusat Statistik Sumatera Barat, komposisi angkatan kerja per-Februari 2021 terdiri atas 2,58 juta orang penduduk yang bekerja dan 184,56 ribu orang pengangguran. Apabila dibandingkan dengan kondisi pada bulan Februari 2020 yaitu kondisi dimana belum terjadi pandemi Covid-19, maka terjadi penurunan jumlah angkatan kerja sebanyak 131,41 ribu orang. Penduduk bekerja mengalami penurunan sebanyak 163,70 ribu orang. Sementara itu apabila dibandingkan kondisi Agustus 2020 (kondisi pandemi Covid-19) meskipun jumlah angkatan kerja turun sebanyak 3,46 ribu orang, penduduk bekerja naik sebanyak 2,60 ribu orang dan pengangguran turun sebanyak 6,05 ribu orang.

Sejalan dengan jumlah angkatan kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Sumatera Barat juga mempunyai pola yang serupa. TPAK adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk usia kerja. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi disuatu negara/wilayah. TPAK pada Bulan Februari 2021 sebesar 68,41 persen, yaitu turun 4,35 persen poin dibanding Bulan Februari 2020 dan turun 0,61 persen poin dibanding Bulan Agustus 2020.

Berdasarkan jenis kelamin, TPAK laki-laki sebesar 81,25 persen lebih tinggi dibanding TPAK perempuan yang sebesar 55,85 persen. Apabila dibandingkan Bulan Februari 2020, baik TPAK laki-laki maupun TPAK perempuan mengalami penurunan. Demikian juga jika dibandingkan dengan Bulan Agustus 2020 TPAK mengalami penurunan yaitu laki-laki turun sebesar 0,83 persen poin, dan perempuan turun sebesar 0,38 persen poin. Hal ini menunjukkan kondisi dimana covid di Sumatera Barat benar-benar berpengaruh kepada sektor-sektor usaha masyarakat.

Pada sektor perekonomian, dalam kurun waktu 6 tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat cenderung mengalami perlambatan. Kondisi ekonomi yang sempat tumbuh 5,27% pada tahun 2016 justru terus menurun hingga hanya mencapai angka 5,05% pada tahun 2019. Pandemi COVID-19 pada tahun 2020 bahkan lebih memperparah kondisi perekonomian daerah yang berkontraksi sekitar -1,6%. Walaupun kondisi ini terjadi hampir di seluruh wilayah di Indonesia dan bahkan dunia, kontraksi pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat tahun 2020 masih lebih baik dari nasional yang berada pada angka -2,07%.

Seiring dengan diterapkannya beberapa kebijakan dalam rangka pemulihan ekonomi di Indonesia khususnya pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat, maka pada tahun 2021, pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan. Berdasarkan data BPS, tercatat pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat mencapai 2,91% sampai dengan triwulan III tahun 2021 dibawah pertumbuhan ekonomi Nasional yang mencapai 3,51%.

Pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat tahun 2021 terjadi pada hampir semua lapangan usaha kecuali Pertambangan dan Galian C serta Jasa perusahaan yang mengalami kontraksi sebesar 1,78 persen dan 0,22 persen. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan adalah Jasa Keuangan sebesar 10,23 persen. Diikuti Informasi dan Komunikasi sebesar 6,32 persen; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 6,23 persen; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 5,90 persen; dan Jasa Lainnya sebesar 5,22 persen.

Struktur perekonomian Sumatera Barat menurut Lapangan Usaha pada triwulan III-2021 didominasi oleh lima kategori utama yaitu: Lapangan Usaha Pertanian, Perikanan dan Kehutanan sebesar 22,04 persen; diikuti oleh Perdagangan Besar-Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 15,77 persen, Konstruksi sebesar 10,14 persen, Transportasi dan Pergudangan sebesar 9,91 persen dan Industri Pengolahan 9,26 persen. Peranan kelima lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Sumatera Barat mencapai 67,12 persen.

Sementara itu, struktur PDRB Sumatera Barat menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku pada triwulan III 2021, tidak menunjukkan

perubahan yang berarti. Perekonomian Sumatera Barat masih didominasi oleh Komponen PK-RT yang mencakup lebih dari separuh PDRB Sumatera Barat yaitu sebesar 53,39 persen diikuti oleh komponen PMTB sebesar 30,27 persen.

Indikator lain dalam meningkatkan perekonomian di Sumatera Barat salah satunya adalah bidang pariwisata. Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi tujuan wisata yang menarik di Indonesia. Pertumbuhan di sektor pariwisata, akan dapat memunculkan *multiplier effect* dengan memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat sekitarnya, memperluas dan pemeratakan kesempatan kerja sekaligus kesempatan berusaha dan tentunya juga memperkenalkan identitas kebudayaan daerah.

Perkembangan industri pariwisata tidak lepas dari jumlah kunjungan wisatawan, Tingkat Penghunian Kamar Hotel (TPK) dan rata-rata lama menginap untuk tamu asing dan tamu dalam negeri. Dari tiga indikator tersebut dapat mencerminkan perkembangan pariwisata di Sumatera Barat. Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel berbintang bulan Oktober 2021 berdasarkan laporan yang masuk dengan rata-rata 52,25 persen atau mengalami peningkatan sebesar 6,37 poin dibanding TPK September 2021 yang tercatat sebesar 45,88 persen.

Bila dilihat menurut klasifikasi hotel, terjadi peningkatan TPK pada semua kategori hotel bintang. Peningkatan terbesar adalah TPK hotel bintang 2 sebesar 10,73 poin, diikuti TPK hotel bintang 4 naik sebesar 5,37 poin, TPK hotel bintang 3 naik sebesar 5,24 poin, dan TPK hotel bintang 1 naik sebesar sebesar 3,35 poin.

Rata-rata lama menginap tamu (RLMT) Asing dan Indonesia pada hotel berbintang di Sumatera Barat kondisi bulan Oktober 2021 adalah selama 1,43 hari, naik 0,08 hari bila dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang tercatat 1,35 hari. RLMT asing bulan Oktober 2021 tercatat 1,82 hari, naik sebesar 0,53 hari dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang tercatat 1,29 hari. RLMT Indonesia bulan Oktober 2021 tercatat 1,43 hari, naik 0,08 hari dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang tercatat 1,35 hari.

Bila dirinci menurut kelas hotel, terlihat RLMT asing pada hotel bintang 2 yang tercatat 3,06 hari paling tinggi dibandingkan kelas hotel lainnya. Diikuti RLMT pada hotel bintang 3 tercatat 2,55 hari, hotel

bintang 4 tercatat 1,50 hari, dan hotel bintang 1 tercatat 1,00 hari. Sementara RLMT Indonesia pada hotel bintang 2 tercatat 1,99 hari paling tinggi dibanding kelas hotel lainnya. Diikuti RLTM pada hotel bintang 3 tercatat 1,28 hari, hotel bintang 4 tercatat 1,22 hari, dan hotel bintang 1 tercatat 1,17 hari.

Pimpinan dan Anggota DPRD Yang Kami Hormati,

Pada bagian kedua buku LKPJ terkait capaian-capaian strategis Daerah yang tergolong kedalam Kebijakan Pemerintah Daerah. Semua itu tentunya berdasarkan kepada visi, misi Pembangunan Jangka Panjang Daerah serta dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan daerah, menyelaraskan dengan prioritas pembangunan nasional serta mengakomodir visi, misi, program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yaitu : *“Terwujudnya Masyarakat Sumatera Barat Madani dan Sejahtera”*.

Visi Pembangunan Provinsi Sumatera Barat ini diharapkan akan mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Provinsi Sumatera Barat dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945, dengan mempedomani RPJMN 2019-2024, dan RPJPD Provinsi Sumatera Barat tahun 2005-2025.

Sumatera Barat Madani adalah suatu kondisi masyarakat yang berperadaban tinggi dan maju yang berbasis pada nilai-nilai, norma hukum, moral yang ditopang oleh keimanan. Masyarakat madani menghormati pluralistis, bersikap terbuka dan demokratis serta selalu bergotong royong menjaga kedaulatan negara. Dengan demikian, masyarakat madani tersebut pada dasarnya adalah masyarakat yang agamais yang ditandai oleh adanya keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat, jasmani dan rohani, lahir dan batin serta material dan spiritual.

Sumatera Barat Sejahtera merupakan suatu kondisi masyarakat yang terpenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, perumahan, air bersih, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan fisik maupun non fisik. Lingkungan hidup dan sumber daya alam, berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik, mempunyai akses terhadap informasi serta hiburan, terciptanya

hubungan antar masyarakat yang dinamis, saling menghargai, bantu membantu, saling pengertian, serta tersediannya prasarana dan sarana publik terkait dengan infrastruktur pelayanan publik, transparansi dan teknologi yang mencukupi, nyaman dan terpeliharaan dengan baik.

Pemenuhan kebutuhan dasar rakyat bersifat dinamis, dari waktu ke waktu akan mengalami perubahan sesuai dengan aspirasi dan tuntutan yang berkembang di masyarakat. Untuk itu sarana dan prasarana dalam usaha memenuhi kebutuhan dasar harus terus menerus mengikuti dinamika perubahan, serta dibuka ruang yang seluas-luasnya untuk mencapai kemajuan dan perkembangan bagi kehidupan yang lebih baik secara berkesinambungan.

Sebagaimana arahan Presiden dalam Pembukaan Musrenbangnas RKP Tahun 2021 yang dilaksanakan pada tanggal 30 April 2020 yang dilakukan melalui Video Convenrence yang diikuti oleh seluruh elemen penyelenggara Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang mengamanatkan bahwa fokus pembangunan tahun 2021 harus mendukung upaya pemulihan terkait dengan dampak penyebaran pandemi Covid -19 diseluruh sektor. sehingga arahan tersebut menjadi keharusan bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan orientasi baru dalam perencanaan pembangunan pada tahun 2021 dengan tanpa mengabaikan kinerja yang ingin dicapai dalam dokumen RPJMD meskipun pada akhirnya akan terjadi koreksian yang cukup signifikan dalam pencapaian target-target makro pembangunan yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD.

Dengan demikian maka perumusan dokumen RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 mengalami beberapa penekanan-penekanan terutama dalam mendukung pemulihan dampak pandemi Covid-19. Hal ini terlihat dari perubahan tema RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 dari semula, hingga pelaksanaan Musrenbang Provinsi yakni “Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Didukung Oleh Pertumbuhan Berkualitas Melalui Pengembangan Hilirisasi Pertanian, Pariwisata, Investasi, Dan Infrastruktur Di Berbagai Wilayah” menjadi **“Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial untuk Sumber Daya Manusia Berkualitas”**
Pimpinan dan Anggota DPRD Yang Kami Hormati,

Bagian Ketiga, dalam LKPJ ini menguraikan mengenai Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah yang terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah, dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah

APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021, yang penyusunannya mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Selanjutnya, dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat juga telah mendukung Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2021 sesuai dengan potensi dan kondisi daerah, serta menyingkronkan kebijakan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah.

Dalam implementasi pelaksanaannya, seiring perkembangan dan kondisi secara global baik di tingkat pusat maupun daerah, pada tahun 2021 terdapat beberapa keadaan yang mengharuskan dilakukannya perubahan terhadap APBD Provinsi Sumatera Barat. Dengan memperhatikan ketentuan dan syarat dapat dilakukannya perubahan APBD, maka sesuai dengan kondisi dan perkembangan yang terjadi, terdapat beberapa hal yang melatarbelakangi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat melakukan pergeseran yang ditindaklanjuti dengan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021, yakni sebagai berikut:

1) Perkembangan Yang Tidak Sesuai Dengan Asumsi KUA

Terdapatnya perubahan-perubahan target indikator makro ekonomi Sumatera Barat antara lain sebagai berikut:

- a. Koreksi target laju pertumbuhan ekonomi dari 4,22% menjadi 3,0% - 3,8% yang disebabkan oleh peningkatan kasus Covid-19 di triwulan II tahun 2021 yang berakibat pada diterapkannya kebijakan Pembatasan Pergerakan, dan Kegiatan Masyarakat (PPKM);

- b. Tingkat Pengangguran Terbuka yang terkoreksi dari 7,77% menjadi 6,52% dimana berdasarkan hasil analisis Pemerintah Daerah, terdapat pemulihan beberapa lapangan usaha di awal 2021, namun dipertengahan tahun 2021 kebijakan pemberlakuan PPKM sedikit berpengaruh terhadap dunia usaha;
- c. Angka Kemiskinan meningkat dari 6.15% menjadi 6,28%-6,56%. Berdasarkan analisis Pemerintah Daerah, terdapat pemulihan beberapa lapangan usaha akibat Pandemi Covid-19 namun belum bisa mencapai target awal RKPD tahun 2021;
- d. Meningkatnya tekanan inflasi dari 1,7%-2,1% menjadi 2,1%-2,5%; dan
- e. Terdapatnya beberapa capaian target penerimaan daerah tahun 2021 yang belum maksimal serta beberapa belanja yang rendah serapannya.

2) Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan serta antar kelompok maupun jenis belanja.

- a. Perubahan kebijakan atau regulasi di tingkat pusat dalam penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang ditetapkan melalui surat Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri .
- b. Kebijakan *Refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID -19) dan dampaknya.
- c. Terdapatnya pergeseran anggaran antar objek belanja dalam jenis belanja yang sama dan pergeseran anggaran antar rincian objek belanja dalam objek belanja yang sama yang diusulkan SKPD, serta *Refocusing* dan realokasi anggaran. Pergeseran

belanja ini dituangkan dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat.

- d. Penyesuaian terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai Visi, Misi dan Program Unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.
- e. Adanya perubahan Struktur Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat di tahun 2021 yang menyebabkan pergeseran anggaran antar organisasi, unit organisasi, program, kegiatan dan jenis belanja.

3) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan.

Pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021 ditetapkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) sebesar Rp. 220.000.000.000, -, namun setelah dilakukan pemeriksaan oleh BPK-RI Perwakilan Sumatera Barat atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 ditemukan dan ditetapkan SiLPA sebesar Rp. 260.850.624.206,07, - SiLPA ini sesuai ketentuan tentunya harus digunakan dalam pembiayaan tahun anggaran 2021.

Pimpinan dan Anggota DPRD Yang Kami Hormati,

Selanjutnya, pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021, ditargetkan untuk penerimaan daerah sebesar Rp. 6.580.124.354.738,-. Mengingat masih terdapatnya beberapa potensi penerimaan yang diperkirakan dapat dicapai dan diterima hingga akhir tahun 2021, maka target Pendapatan Daerah mengalami penambahan target menjadi sebesar Rp. 6.652.314.674.092,-.

Perubahan target Pendapatan tersebut berasal dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

pada APBD awal sebesar Rp. 2.333.922.757.251,- dan pada APBD Perubahan sebesar Rp. 2.469.508.994.798,-. Artinya terdapat penambahan sebesar Rp. 135.586.237.547,-.

b. Pendapatan Transfer

pada APBD awal sebesar Rp. 4.153.832.129.509,- dan pada APBD Perubahan sebesar Rp. 4.089.410.456.700,-. Artinya terdapat pengurangan sebesar Rp. 64.421.672.809,-.

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Pada APBD awal sebesar Rp. 92.369.467.978,- dan pada APBD Perubahan sebesar Rp. 93.395.222.594,-. Artinya ada penambahan sebesar Rp. 1.025.754.616,-.

Dari data tersebut dapat dijelaskan bahwa:

- a. Pada rekening PAD, penambahan target PAD berasal dari sektor Pajak Daerah dan Lain-lain PAD yang sah. Hal ini dilakukan setelah memperhatikan dan melakukan kajian terhadap potensi penerimaan yang berasal dari BBNKB, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Rokok. Ketiga objek pajak Daerah tersebut sangat memungkinkan untuk bisa ditingkatkan target penerimaannya. Kemudian pada sektor Lain-lain PAD yang sah, kemungkinan ditingkatkan target capaiannya dari target awal APBD, berasal pendapatan bunga dan Pendapatan Pengembalian
- b. Untuk Pendapatan Transfer, perubahan target penerimaan merupakan transfer Pemerintah Pusat kepada Provinsi Sumatera Barat yang dialokasikan melalui APBN dan Perubahan APBN Tahun Anggaran 2021.
- c. Adapun untuk Lain-lain Pendapatan Daerah, penerimaan yang ditargetkan berasal dari Pendapatan Hibah yakni Hibah Pemerintah Pusat dan Sumbangan dari Pihak Ketiga. Untuk Sumbangan Pihak Ketiga, merupakan salah satu objek penerimaan daerah yang potensial sehingga pada Perubahan APBD, penerimaannya ditambah target penerimaannya.

2. Belanja Daerah

Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat pada APBD awal dianggarkan sebesar Rp. 6.780.124.354.738, -, dan pada perubahan APBD, anggaran belanja tersebut bertambah menjadi

Rp. 6.898.114.698.298,- Perubahan anggaran belanja dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Belanja Operasional pada APBD awal ditetapkan sebesar Rp.4.980.016.545.724,-. Kemudian pada APBD perubahan ditetapkan sebesar Rp.4.952.024.358.797,-. Artinya berkurang sebesar Rp. 27.992.186.927,-.
- b. Belanja Modal, pada APBD awal ditetapkan sebesar Rp. 836.913.146.165,-. Kemudian pada APBD perubahan ditetapkan sebesar Rp. 836.061.093.490,-. Artinya berkurang sebesar Rp. 852.052.675,-).
- c. Belanja Tidak Terduga pada APBD awal ditetapkan sebesar Rp. 50.000.000.000,-. Kemudian pada APBD perubahan ditetapkan sebesar Rp.107.000.000.000,00,-.Artinya bertambah sebesar Rp. 57.000.000.000,-.
- d. Belanja Transfer, pada APBD awal ditetapkan sebesar Rp. 913.194.662.849,-. Kemudian pada APBD perubahan ditetapkan sebesar Rp. 1.003.029.246.011,-. Artinya bertambah sebesar Rp.89.834.583.162,-

Adapun perubahan-perubahan belanja sebagaimana tersebut di atas, antara lain adalah:

- a. Pada belanja operasional terdapat pengurangan dan pergeseran belanja sebesar Rp 27.992.186.927,- yang disebabkan oleh refocusing dan rasionalisasi belanja pada beberapa Program dan Kegiatan oleh OPD pelaksana urusan pemerintahan;
- b. Untuk belanja modal juga mengalami penurunan anggaran dikarenakan oleh penundaan beberapa pengadaan Belanja Modal di beberapa OPD;
- c. Adapun pada Belanja Tidak Terduga mengalami penambahan anggaran sebesar Rp. 57.000.000.000 -, diperuntukkan bagi kegiatan terkait pandemi Covid-19 seperti: biaya RSUD Rujukan Penanganan Covid, tempat karantina pasien di kampung nelayan dan asrama haji, biaya labor Unand yang bekerjasama dengan Pemprov dalam pemeriksaan sampel,

serta untuk honor tenaga kesehatan dan APM yang diperlukan untuk penanganan Covid-19; dan

- d. Sedangkan untuk Belanja Transfer, mengalami kenaikan anggaran sebesar pada Belanja Bagi Hasil kepada Kabupaten/Kota, yang merupakan penambahan belanja sebagai dampak pemenuhan kewajiban atas tunggakan bagi hasil ke daerah pada tahun sebelumnya dan kurang salur bagi hasil di tahun 2021.

3. Pembiayaan Daerah

Pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021, dianggarkan penerimaan pembiayaan yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun (SiLPA) Lalu yakni sebesar Rp. 220.000.000.000,-, namun setelah dilakukan pemeriksaan oleh BPK-RI Perwakilan Sumatera Barat atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 ditetapkan SiLPA sebesar Rp. 260.850.624.206,07,-.

Selanjutnya SiLPA dimaksud akan digunakan untuk membiayai sisa kegiatan yang bersifat earmark seperti kegiatan DAK Fisik dan Non Fisik, sisa dana BLUD dan sisa bantuan keuangan dari kabupaten/kota, disamping untuk pembiayaan lainnya yang bersifat prioritas.

Pimpinan dan Anggota Dewan serta hadirin yang kami hormati,

Pada bagian keempat, dalam LKPJ ini disampaikan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, terutama terkait dengan urusan wajib pelayanan dasar. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah mengintegrasikan dalam dokumen perencanaan dan anggaran daerah serta target pencapaian pada setiap perangkat daerah pengampu SPM. Pengintegrasian ini bertujuan untuk memastikan penerapan SPM mencapai target yang diharapkan sesuai dengan kemampuan daerah.

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 yang termuat dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun

2021-2026 menjadikan penerapan SPM termasuk dalam isu strategis pembangunan Provinsi Sumatera Barat. Isu strategis kemudian menjadi arah kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Untuk memberikan pelayanan publik secara maksimal kepada masyarakat, yang berorientasi terhadap terwujudnya pelayanan publik yang prima, maka Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam menyelenggarakan pelayanan dasar dengan tujuan peningkatan pelayanan prima yang secara langsung menyentuh kepentingan masyarakat umum sehingga terwujud suatu pelayanan prima menuju Good Governance.

Mengingat percepatan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan salah satu kebijakan prioritas nasional yang perlu mendapat perhatian dan tindak lanjut oleh Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah melakukan langkah-langkah untuk percepatan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada enam urusan wajib pelayanan dasar tersebut.

1. Urusan Pendidikan, berdasarkan target indikator makro bidang pendidikan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021, angka rata-rata lama sekolah 8,92 tahun pada tahun 2019 dan meningkat 0,07 poin menjadi 8,99 pada tahun 2020 dan meningkat kembali menjadi 9,07 Tahun pada Tahun 2021 ini.

Keberhasilan Urusan Pendidikan pada tahun 2021 ditunjukkan beberapa hal, diantaranya adalah dengan meningkatnya akses dan pemerataan pendidikan, dengan indikator kinerja :

- a. Angka Partisipasi Murni SMA/SMK/MA/SMALB/Paket C dengan capaian kinerja 103,47 %.
- b. Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/MA/SMALB/Paket C (dengan capaian kinerja 105,55 %.
- c. Angka Kelulusan SMA/MA/LB/Paket C dengan capaian kinerja 99,92%.
- d. Angka Kelulusan SMK dengan capaian kinerja 98,13 %.
- e. Jumlah lulusan SMA yang melanjutkan ke Perguruan Tinggi dengan capaian kinerja 90,01 %. Pencapaian tersebut

menunjukkan bahwa sasaran dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ketingkat yang lebih tinggi dapat tercapai.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat selain berupaya meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan, juga fokus pada upaya peningkatan standar pendidikan di Sumatera Barat, hal ini terlihat dengan semakin meningkatnya jumlah sekolah menengah yang terakreditasi pada tahun 2021 dengan capaian 98,43 persen, naik dibanding tahun 2020 dengan persentase 77,16 persen.

2. Urusan Kesehatan, dengan sasaran kinerja yakni :

- a. Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan dengan indikator kinerja yaitu : Jumlah Puskesmas Yang Terakreditasi, dengan realisasi kinerja sebanyak 279 Puskesmas, dengan capaian kinerja sebesar 143 %. Kemudian Jumlah Rumah Sakit Yang Terakreditasi, Realisasi Kinerja : 4 RS, dengan capaian kinerja 57,14 %.
- b. Meningkatnya Kesehatan Masyarakat dengan indikator kinerja yaitu: Prevalensi Stunting dengan Realisasi Kinerja 19,11 dan capaian kinerja sebesar 125 %. Kemudian persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan, dengan Realisasi Kinerja : 77,71, dan capaian kinerja sebesar 86,34 %. Selain itu, juga pada persentase Kunjungan Neonatal Pertama (KN1), dengan Realisasi Kinerja : 83,6 %, dan capaian kinerja sebesar 88 %.
- c. Meningkatnya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dengan indikator kinerja yaitu: Jumlah Kab/Kota yang mencapai 80% Imunisasi Dasar Lengkap pada Anak Usia 0 - 11 Bulan, dengan Realisasi Kinerja : 1 kab/kota), dengan capaian kinerja 5,6 %.
- d. Meningkatnya Kepesertaan Jaminan Kesehatan dengan indikator kinerja yaitu Persentase Masyarakat yang Terjamin Kesehatannya, dengan Realisasi Kinerja : 83,32 %, dan capaian kinerja 83,32 %.

Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat. Untuk melihat keberhasilan Derajat Kesehatan Masyarakat, maka Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah menetapkan *Universal Health Coverage* (UHC) dan pada tahun 2021 UHC Provinsi Sumatera Barat telah tercapai sebesar 90% dengan segmen kepesertaan PBI 1.913.477 jiwa, PBI APBD 697.188 jiwa, PPU 1.050.769 jiwa, PBPU 831.838 orang, BP 100.405 jiwa. Dari jumlah penduduk Sumatera Barat yaitu 5.580.007 jiwa, sehingga didapat 34,29 % jumlah Penduduk Sumatera Barat sudah mendapatkan jaminan kesehatan nasional dari anggaran APBN.

Ada 5 (Lima) Kab/Kota yang mencapai UHC di Provinsi Sumatera Barat yaitu Kota Padang Panjang, Kota Sawahlunto, Kota Solok, Kota Pariaman dan Kab. Pasaman. Diharapkan kab/kota yang belum UHC agar membuat kebijakan dalam bentuk Perbup/Perwako tentang pendaftaran seluruh masyarakatnya untuk ikut serta dalam program JKN.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Kesehatan Daerah Provinsi, berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan terdiri dari :

- 1) Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi.

Pada tahun 2021, pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana di Sumatera Barat terfokus pada bencana non alam yaitu temuan Kasus Covid-19 mulai Januari 2021 s/d Desember 2021.

Data untuk Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi adalah data pasien Covid-19 yang dilayani.

Sampai dengan bulan Desember 2021 jumlah sampel yang diperiksa sebanyak 718.441 sampel. Pasien terkonfirmasi (+) 65.476 orang dan meninggal 1.633 orang.

Capaian kinerja Pemerintah daerah Provinsi dalam melakukan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi adalah 100%.

- 2) Pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Provinsi.

Selama tahun 2021, terdapat 8 (delapan) kabupaten/kota yang melaporkan terjadinya KLB di daerahnya dan melakukan investigasi \leq 24 jam sejak diketahui adanya KLB, yakni Kab. Solok, Kab. Pasaman, Kab. Sijunjung, Kab. Pasaman Barat, Kab. Pesisir Selatan, Kab. Tanah Datar, Kota Pariaman dan Kota Padang dengan penduduk yang terdampak KLB sebanyak 451 orang. Sedangkan 11 Kabupaten/Kota lainnya tidak dilaporkan adanya KLB.

Capaian kinerja Pemerintah daerah Provinsi dalam melakukan pelayanan kepada sasaran kondisi KLB di provinsi, dinilai dari persentase jumlah penduduk kondisi KLB yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar dibandingkan jumlah penduduk kondisi KLB adalah 100%.

3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dengan beberapa indikator kinerja, yaitu :

- a. Persentase Jalan Mantap dengan Realisasi Kinerja : 75,034, dan capaian kinerja 105,05 %.
- b. Persentase Cakupan Air Minum dengan Realisasi Kinerja : 82,86 %, dan capaian kinerja 101,56 %.
- c. Persentase Cakupan Sanitasi dengan Realisasi Kinerja 82,05 %, dan capaian kinerja 102,56 %.
- d. Persentase Kesesuaian Program Rencana Pembangunan dengan Program RTRW Provinsi dengan Realisasi Kinerja : 86 %), dan capaian kinerja 100 %.

Untuk pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar di Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang, realisasi jumlah warga negara yang terlayani adalah 0. Meskipun demikian capaian SPM tetap dinilai 100 % karena yang menjadi kewenangan Provinsi belum tersedia dan masih berproses pada tahap Kerja Sama antar Kab/Kota, yakni :

- a. Kabupaten Agam-Kota Bukittinggi
- b. Kabupaten 50 Kota-Kota Payakumbuh
- c. Kabupaten Padang Pariaman-Kota Pariaman
- d. Kabupaten Solok-Kota Solok
- e. Kabupaten Padang Pariaman-Kota Padang.

Pada tahun 2021, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melakukan beberapa upaya untuk mempercepat pelaksanaan Pembangunan SPAM Regional Provinsi Sumatera Barat, yaitu :

- a. Mendorong kab/kota yang tergabung dalam program SPAM Regional Provinsi Sumatera Barat untuk segera menyiapkan readiness criteria untuk pembangunan SPAM Regional.
- b. Melibatkan Balai Perumahan dan Permukiman wilayah Sumbar untuk mendukung langkah percepatan melalui program Engineering Service Project (ESP) Kementerian PUPR, melaksanakan kegiatan penyusunan RISPAM Provinsi dan Studi Kelayakan SPAM Regional Kab/Kota.

4. Urusan Perumahan Rakyat dan Permukiman,

Dalam pemenuhan SPM bidang Perumahan Rakyat pada tahun 2021 masih melakukan tahapan pengumpulan data primer lapangan untuk rumah yang berada di kawasan bencana dan *negative list* di 4 (empat) kab /kota di provinsi Sumatera Barat, yakni Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Solok Selatan, Kota Bukittinggi dan Kota Padang Panjang.

Capaian Pemenuhan SPM bidang Perumahan Rakyat yang terdiri dari penyediaan & rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana dan fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi, untuk tahun 2021 masih stabil karena tidak adanya bencana alam dan program relokasi yang

merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat. Oleh karena itu, capaian SPM Perumahan tetap dinilai 100 % oleh Pemerintah Pusat.

5. **Urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat**, dengan beberapa indikator kinerja, salah satunya adalah Meningkatnya kualitas pencegahan dan penanganan gangguan lingkungan masyarakat, dengan indikator kinerja yaitu Persentase gangguan lingkungan masyarakat yang dapat dicegah dan ditangani dengan Realisasi Kinerja 75,00%, dan capaian kinerja sebesar 94,94%.
6. **Urusan sosial**, yang dapat dilihat dari beberapa indikator, seperti Meningkatnya Pelayanan Rehabilitasi Sosial, dengan indikator kinerja yaitu Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dengan Realisasi Kinerja : 4.905 orang, dan capaian kinerja 100%.

Walaupun program dan kegiatan yang dilaksanakan sepanjang tahun 2021 adalah gabungan antara RPJMD tahun 2016-2021 dan RPJMD 2021-2026 yang sebagian besar didominasi oleh program kegiatan untuk menuntaskan RPJMD 2016-2021, perlu kami sampaikan bahwa dalam mendukung perwujudan Visi dan Misi Daerah, telah dilaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Membangun SMA/SMK baru berdasarkan potensi daerah dan Penambahan Ruang Kelas Baru (RKB) untuk pemerataan akses melalui program pengelolaan pendidikan pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat. Pada tahun 2021 telah terlaksana penambahan ruang kelas baru pada 26 SMA/SMK, pembangunan ruang laboratorium pada 21 sekolah yang terdiri dari laboratorium IPA dan laboratorium komputer.
2. Menyediakan sanitasi layak di sekolah dan fasilitas umum lainnya serta peningkatan kesadaran masyarakat untuk mendukung adaptasi kebiasaan baru melalui kegiatan Pembangunan Sarana. Prasarana dan Utilitas Sekolah, pada tahun 2021 telah dibangun di 179 SMA dan 68 SMK di Sumatera Barat.

3. Menjadikan Kawasan Masjid Raya Sumatera Barat (Mesjid Raya, gedung LKAAM dan gedung MUI) sebagai pusat pembelajaran ABS SBK dan wisata religi.
4. Mencetak 100 ribu millennial entrepreneur dan women entrepreneur serta pelaku ekonomi kreatif, salah satunya melalui program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada DInas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Prov. Sumatera Barat. Pada tahun 2021 ditetapkan target jumlah enterpreneur baru tercipta 1040 orang, dimana realisasi yang dicapai adalah 1.040 orang dengan capaian kinerja 100%. Capaian tersebut diwujudkan melalui kegiatan: Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan untuk 320 orang, Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Homestay dan Pemandu Wisata (Tour Guide) Tingkat Lanjutan untuk 110 orang, Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata untuk 250 orang, Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif untuk 260 orang, Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif untuk 100 orang.
5. Berkenaan dengan salah satu program strategis nasional (PSN) pembangunan jalan tol pekanbaru padang dibawah pengawasan Kementerian PUPR yang telah dimulai sejak Februari 2017 yang berada dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat, yang dibagi dalam 4 (empat) seksi yaitu:
 - a. Seksi pangkalan- Payakumbuh sepanjang 45,5 Kilometer.
 - b. Seksi Payakumbuh - Bukitinggi sepanjang 32,8 Kilometer
 - c. Seksi Bukitinggi - Sicincin sepanjang 39,9 Kilometer dan,
 - d. Seksi sicincin - Padang sepanjang 36,6 Kilometer.

Perlu kami informasikan bahwa pembangunan jalan tol saat ini baru seksi sicincin - Padang yang sudah masuk dalam tahap kontruksi dengan realisasi fisik 45,25 % dan lahan 36,01 % dan direncanakan akhir 2023 sudah dapat dioperasikan, sedangkan untuk 3 (tiga) seksi lainnya masih dalam proses *basic design*.

Pimpinan dan Anggota Dewan serta hadirin yang kami hormati,

Pada bagian kelima, LKPJ ini berkenaan dengan Penyelenggaraan Tugas Pembantuan di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021.

Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2021 kembali mendapatkan pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat dalam bentuk Tugas Pembantuan melalui APBN dengan alokasi anggaran sebesar Rp.116.299.071.000,00 dengan serapan anggaran sebesar Rp.113.833.201.484,00 atau 97,88%. Tugas Pembantuan melalui APBN ini pun diberikan oleh 3 (tiga) Kementerian yang sama dengan tahun lalu yaitu :

1. Kementerian Pertanian.
2. Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
3. Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Tugas Pembantuan ini sebagaimana konsep dasarnya adalah bagaimana urusan-urusan atau program/kegiatan pemerintah yang ada di Daerah bisa terbantu sehingga dalam upaya pencapaian target menjadi lebih efektif dan efisien.

Penugasan Urusan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 terbagi pada program/kegiatan 5 (lima) perangkat daerah, yaitu Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang dan Dinas Sumber Daya Air dan Bina Kontruksi.

Untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang didanai baik melalui APBD maupun APBN tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat secara rutin melakukan sinkronisasi dan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Instansi Vertikal, serta Pemerintah Kabupaten/Kota, baik pada tingkat sektoral OPD maupun pada tingkat pemerintah daerah melalui Rapat Koordinasi Gubernur dengan Bupati/Walikota, dengan Camat serta dengan Wali Nagari/Kepala Desa dan Lurah. Hal ini dilakukan guna menjamin bagaimana tujuan dan sasaran bisa tercapai secara baik sesuai dengan yang diharapkan. Dan

sejauh ini, pelaksanaan tugas pembantuan ini dapat diselenggarakan dengan baik.

Pimpinan dan Anggota Dewan serta hadirin yang kami hormati,

Disamping pencapaian berbagai keberhasilan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pada Tahun Anggaran 2021 yang lalu, tentunya masih ada berbagai persoalan dan tantangan yang belum dapat diselesaikan secara optimal, dan tentunya hal-hal tersebut harus kita selesaikan dan perbaiki sehingga tidak akan terjadi lagi di tahun-tahun yang akan datang.

Banyak hal yang kita cita-citakan dan rumuskan secara seksama untuk bisa dicapai. Semuanya tentu akan berujung kepada pencapaian sebuah kondisi kemajuan Daerah dan peningkatan kesejahteraan Masyarakat Sumatera Barat. Oleh karena itu, kami mengharapkan dukungan penuh serta kerjasama yang lebih intensif lagi dari seluruh jajaran pemerintah daerah dan DPRD, instansi vertikal, BUMN dan BUMD, akademisi, swasta serta seluruh lapisan masyarakat. Mari kita bersama-sama bersatu padu membangun Sumatera Barat kedepannya,

Kita berdoa kepada Allah SWT, semoga cita-cita mulia ini bisa dikabulkan dan diwujudkan.

Selanjutnya perlu kita pahami bersama bahwa, seperti yang terjadi di seluruh Provinsi di Indonesia, pada tahun 2021, Provinsi Sumatera Barat juga mengalami dampak dari pandemi Covid-19. Dalam penanganan pandemi Covid-19 telah ditetapkan berbagai kebijakan strategis, baik yang difokuskan pada penanganan kesehatan, pemulihan ekonomi, dan kebijakan penganggaran keuangan daerah. Semua diakselerasi melalui inovasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak, diantaranya seperti pembatasan pergerakan masyarakat, edukasi budaya hidup sehat dan kepatuhan terhadap aturan, strategi *test* dan *trace/track* untuk memetakan persebaran Covid-19 secara proaktif, dengan dukungan *mobile test* Covid-19. Kita berupaya terus untuk meningkatkan tingkat kesembuhan dengan menyiapkan seluruh rumah sakit rujukan dan ruang isolasi.

Bahwa Covid-19 ini masih belum bisa diprediksikan kapan akan berakhirnya. Saat ini lonjakan kasus kembali terjadi, *varian omicron* walaupun dari sisi gejala tidak terlalu membahayakan, namun dari sisi

penyebaran sangat perlu kita perhatikan dan antisipasi. Jangan sampai, gelombang omicron ini akan kembali merusak sendi-sendi perekonomian Daerah dan masyarakat.

Pimpinan dan Anggota Dewan serta hadirin yang kami hormati,

Demikian Nota Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Sumatera Barat Tahun 2021 ini kami sampaikan. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan peran sertanya dalam membangun Provinsi Sumatera Barat. Semoga seluruh upaya yang telah dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah menjadi amal ibadah untuk kita semua dan diridhoi oleh Allah Subhana Wata'ala . Aamiin Ya Rabbal Alamin.

Terima kasih atas perhatiannya.

Billahi Taufik Wal Hidayah.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Padang, Februari 2021

GUBERNUR SUMATERA BARAT,



MAHYELDI